

BAB III

GENEALOGI FPI

A. Akar dan Genealogi Berdirinya FPI

Ketika terjadinya proses reformasi, hampir tidak ada kekuatan yang dominan yang bisa mengendalikan gerakan masyarakat. Bahkan, aparat Negara juga tidak memiliki peran yang efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial masyarakat. Yang terjadi adalah munculnya anarki sosial yang ditandai dengan maraknya kerusuhan di berbagai lapisan masyarakat. Setiap elemen masyarakat pada saat itu memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi, membentuk kelompok-kelompok sosial guna mengekspresikan kepentingan masing-masing.¹

Dalam suasana di mana kekuasaan yang ada tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, setiap kelompok dapat secara bebas memperjuangkan dan mengekspresikan kepentingannya, sekalipun harus bertentangan dengan atauran hukum. Konflik sosial yang diwarnai dengan tindak kekerasan terjadi di mana-mana, mulai dari Aceh, Ambon, Poso, hingga Sanggau Ledo-Pontianak. Ada semacam tindakan balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Negara dan juga terhadap kelompok sosial lainnya yang dianggap sebagai bagian dari Negara. Reformasi

¹ Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Partai Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 85

merupakan arus balik gerakan sosial, dari dominasi kekuasaan Negara ke kekuatan rakyat².

Oleh karena itu, tidak ada situasi yang kondusif, yakni tiadanya proses sosialisasi dan konsolidasi yang memadai, terjadinya arus balik ini tidak menyebabkan timbulnya iklim sosial politik yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi dan justru sebaliknya, menjadi ajang balas dendam yang melahirkan konflik dan kekerasan sosial. Masing-masing kelompok saling berebut kepentingan dengan menjadikan reformasi dan demokrasi sebagai legitimasi bagi tindakan mereka masing-masing. Sekelompok masyarakat yang pada masa Orde Baru yang merasa ditindas dan dirampas hak-haknya serta diperlakukan secara tidak adil oleh Negara, pada era reformasi mereka bangkit dan melakukan perlawanan untuk merebut kembali hak-hak mereka yang terampas. Sebaliknya, kelompok yang dulunya menjadi bagian dari Negara berusaha menggunakan proses reformasi semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak dengan cara menyamar menjadi pejuang reformasi dan demokrasi.³

Umat islam, merupakan bagian terbesar dari bangsa ini, merasa bahwa reformasi adalah momentum yang sangat tepat merebut posisi penting dalam kekuasaan. Sebab, selama Orde Baru, umat islam yang mayoritas justru hanya menjadi korban pembangunan, tanahnya diambil secara paksa untuk pembangunan, hak-hak politiknya dibatasi karena dianggap mengganggu stabilitas, dan geraknya pun selalu dicurigai. Selama pemerintahan, Orde

² Ibid, 86

³ Ibid, 86

Baru, seluruh kekuatan politik strategis, seperti pemegang kebijakan (*policy*) sektor ekonomi dan bisnis, selalu dikuasai oleh etnis Cina atau orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap umat Islam.⁴

Ketika reformasi terjadi, sebagian umat islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran politik yang lebih stategis. Bagi kelompok islam jenis ini, reformasi merupakan peluang untuk merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh Negara. Dengan hilangnya kekuatan Negara dan aparaturnya, umat islam memiliki kesempatan untuk menawarkan nilai-nilai islam sebagai alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai dan dituding sebagai kelompok ekstrim kanan (kelompok fundamentalis) yang harus diberangus. Bahkan mereka merasa bangga dengan sebutan-sebutan tersebut.⁵

Selain karena alasan tersebut, bangkitnya kekuatan islam jenis ini juga didorong oleh suatu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan martabat islam dan sekaligus umat islam. Sebagaimana dijelaskan didepan hilangnya peran Negara dan aparat pemerintahan, banyak umat islam yang menjadi korban dari berbagai konflik sosial. Tindakan maksiat terjadi di mana-mana tanpa ada kontrol dari pemerinta. Di sini umat islam kembali menjadi korban.⁶

Menurunnya peran Negara juga berdampak pada hilangnya tertib hukum di masyarakat. Banyak peraturan pemerintah yang dilanggar oleh

⁴ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: tiara wacana, 1999), 87

⁵ Ibid, 87

⁶ Ibid 89

masyarakat, termasuk di sini adalah mengenai judi dan kemaksiatan. Menurut Front Pembela Islam (FPI), Pada era reformasi, pemerintah tidak dapat mengendalikan terkadinya tindak kemaksiatan, seperti perjudian, narkoba, minuman keras, dan beroperasinya tempat-tempat maksiat secara terbuka. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, berkewajiban mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk memerangi kemaksiatan tersebut.⁷ Dalam wawancara dengan ketua FPI DPW Surabaya, Habib mengatakan:

“Awalnya itu, kita melihat banyak kemaksiatan di mana-mana, sehingga ada panggilan dari hati untuk mendirikan. Selain itu, melalui proses yang lama, yaitu melalui sholat istikhoro beberapa kali maka dengan ijin dari pemimpin pusat maka akhirnya FPI didirikan. Selain itu juga, ketika kita mengadakan pengajian-pengajian kita di ganggu sama preman-preman, dari situ kita mulai terganggu dan merasa terintimidasi akhirnya berfikir untuk mendirikan FPI.”⁸

Front Pembela Islam (FPI) merupakan suatu organisasi Islam yang muncul akibat menurunnya peran Negara yang berdampak pada hilangnya tertib hukum di masyarakat. FPI lahir secara resmi pada 17 Agustus 1998, bertepatan dengan 24 rabiuts Tsani 1419 H, di Pondok Pesantren Al-umm, kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI didirikan oleh sejumlah haba'ib, ulama, muballigh, serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang melopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Riziq Shihab. Sebagai sebuah organisasi gerakan, para aktivis ini telah melakukan berbagai aktivitas keagamaan seperti tabligh akbar, audensi, silaturahmi, dan juga demonstrasi.

⁷ Habib Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkr*, (jakarta, Ibnu Saidah, 2008), 89

⁸ Wawancara dengan Mohamad Mahdi Edrus Al-Habsyi, 13 Januari 2013, di kediamannya, Petukangan Surabaya

Sebagai bagian dari masyarakat, FPI merasa memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa.⁹

FPI berdiri untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal. Dalam mencapai tujuan amar ma'ruf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan *hikmah* (kebijaksanaan, lemah lembut), member *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran.¹⁰

B. Visi dan Misi FPI

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi), bahwa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezholiman dan kemungkaran. Tanpa penegakan *amar ma'ruf*

⁹ Habib Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 90

¹⁰ Ibid, 92

nahi munkar, mustahil kezholiman dan kemunkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia.

FPI bermaksud menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara káffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah 'Azza wa Jalla. Sifat organisasi ini bersifat mandiri dan tidak menjadi bagian dari ormas/orsospol manapun juga, di mana pedoman yang digunakan adalah Allah SWT sebagai tujuan kami, Muhammad Saw adalah teladan kami, Al-Qur'an adalah pedoman kami dan syahid adalah cita-cita kami. Dan juga semboyan dari FPI adalah hidup mulia atau mati syahid.¹¹

Maka bukan corong penguasa akan tetapi merupakan sebagai pelayan umat dan pembela agama, hidup mulia atau mati syahid, itu merupakan visi dan misi FPI. Prinsip mujahid menurut FPI adalah difitnah biasa, dibuang tamasya, dipenjara uzla, dan dibunuh adalah termasuk syahid.¹²

Dari visi misi FPI sudah terlihat bahwa FPI bukanlah organisasi yang dibentuk oleh penguasa dan bukan alat penguasa untuk menyuarakan kepentingannya, melainkan mereka lebih kepada pelayanan umat dan membela agama. Akan tetapi, kalau kita melihat prinsip mujahid yang digunakan FPI, penulis melihat bahwa tidak adanya keseriusan FPI dalam menyuarakan *Amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari FPI sendiri. Seain itu idiologi yang digunakan FPI dalam memahami prinsip mujahid atau mujahidin sendiri masih cenderung lemah dan kaku, jadi bisa

¹¹ Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART), t.t

¹² Ibid, 01

dikatakan asal dia masuk dalam organisai pembela agama, dan matinya dibunuh itu sudah termasuk mati syahid.

C. Struktur dan Format Organisasi FPI

Dalam bukunya Hibib Riziq, Dialog *FPI: Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dijelaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi yang menjadi wadah kerja sama ulama dan umat islam dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. FPI bukan cabang dari satu organisasi massa (ormas) yang ada atau pernah ada di dunia. Dan FPI tidak berafiliasi keorganisasi sosial manapun. Akan tetapi, dalam Pedoman FPI (AD/ART) dijelaskan bahwa anggota FPI dapat merangkap anggota pada organisasi lain dengan syarat organisasi tersebut berasas islam serta mempunyai visi dan misi yang sama dan beraqidahkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. FPI adalah organisasi dengan konsentrasi perjuangan dakwah di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar dan terluas di dunia. Karenannya, FPI berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Jakarta Indonesia dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang do propinsi, kabupaten/Kotamadya, dan Kecamatan di seluruh dunia. Dan disitu juga dijelaskan bagaimana struktur organisasi yang ada di FPI.

Struktur Organisasi FPI Pusat sebagai berikut:

1. Dewan Piminan Pusat (DPP) di tingkat Pusat
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Propinsi
3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Kabupaten dan Kotamadya

4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan
5. Pos Komando (Posko) di tingkat Kelurahan
6. Dewan Perwakilan Front (DPF) di Luar Negri

Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun dalam dua komponen, yaitu Majelis Syura dan Majelis tanfidz:

Majlis Syura adalah Dewan Tertinggi Front yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekertaris. Majelis Syura dalam melaksanakan tugasnya di damping lima Wakil Ketua yang masing-masing adalah Dewan Tertinggi Front. Dewan Tinggi Front ada lima, yaitu:

1. Dewan syari'at
2. Dewan Kehormatan
3. Dewan Pembina
4. Dewan Penasihat
5. Dewan Pengawas

Kemudian Majelis Tanfidz ialah badan pengurus harian. Majelis Tanfidzi di tingkat pusat di pimpin seorang ketua umum yang dibantu oleh beberapa orang ketua. Dan sekertaris jendral yang dibantu beberapa orang sekertaris. Serta seorang bendahara ahli yang dibantu oleh beberapa orang bendahara.

Sedangkan Majelis Tanfidz di tingkat daerah/Wilayah/Cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan seorang sekertaris yang dibantu seorang wakilnya. Serta seorang bendahara yang dibantu seornng wakilnya.

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT – FRONT
PEMBELA ISLAM

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ketua Majelis Syura | : KH. M. Amin Sarbini |
| 2. Ketua Dewan Syariat | : Al-Habib Ali bin Sahil |
| 3. Ketua Dewan Kehormatan | : KH. Muhammad Munif |
| 4. Ketua Dewan Pembina | : KH. Ma'sum A. Hasan |
| 5. Ketua Dewan Penasihat | : KH. Muhammad Semur |
| 6. Ketua Dewan Pengawas | : Al-Habib Sholeh Al-Habsy |
| 7. Ketua Umum | : Al-Habib Riziq Syihab |
| 8. Ketua I | : KH. Cecep Bustami |
| 9. Ketua II | : KH. Ahmad Damanhuri, LC |
| 10. Ketua III | : KH. Drs. Oman Syahroni |
| 11. Sekretaris Jendral | : KH. Misbahul Anam |
| 12. Bendahara Ahli | : Ust. A. Defri Dahler, SE |
| 13. Ketua Dept. Agama | : KH. Drs. Munif Ahmad |
| 14. Ketua Dept. Luar Negri | : Ust. Drs Hasanuddin |
| 15. Ketua Dept. Dalam Negri | : Ust. H. Drs. A. Sobri Lubis |
| 16. Ketua Dept. Hamkam & HAM | : Al-Habib Ahmad Aidid |
| 17. Ketua Dept. Sosopolhuk | : KH. Drs. Syahrial Asfari |
| 18. Ketua Dept. Dikbud | : Al-Habib Muhsin A. Alattas |
| 19. Ketua Dept. Ekuin | : Hb. M hadun Alattas |
| 20. Ketua Dept. Ristek | : Prof. DR. Ir. Saerul Alam |
| 21. Ketua Dept. Pangan | : KH. Drs. Zainuddin Ali |

- 22. Ketua Dept. Kesra : KH. Drs. Nurzaini Suanda
- 23. Ketua Dept. Penerangan : Drs. Iskandar Triaksono
- 24. Ketua Dept. Kewanitaan : Ustzh. Dra. Naila Balahmar
- 25. Ketua Badan Ahli Front (BAF) : Habib Segaf Mahdi
- 26. Ketua Badan Pengkaderan Mujahid (BPM) : Ust. Abdul Azis Balfas, LC
- 27. Ketua Badan Inteljen Front (BIF) : Ust. TB. M. Sidiq AR
- 28. Ketua Badan Hukum Front (BHF) : KH. TB. ABD Rahman, SH
- 29. Ketua Anti Badan Anti Ma'siat (BAM) : Ust. Drs. Siroj Alwi
- 30. Ketua Anti Badan Teror (BAT) : KH. TB. Entus Hasanuddin

FPI memiliki 12 (dua belas) departemen:

- 1. Departemen Agama membidangi bid'ah, dakwah, dan fatwa
- 2. Departemen Luar Negri membidangi urusan luar negri
- 3. Departemen Dalam Negri membidangi urusan dalam negri
- 4. Departemen Bela Negara dan Jihad membidangi pertahanan, keamanan, dan jihad
- 5. Departemen sosial, Politik, Hukum, dan HAM membidangi sosial, politik, hukum dan HAM
- 6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membidangi kebudayaan dan pendidikan
- 7. Departemen EKUIN membidangi ekonomi, keuangan, dan industry
- 8. Departemen Riset dan Teknologi membidangi riset dan teknologi
- 9. Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan
- 10. Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan

11. Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan

12. Departemen Kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak

FPI juga memiliki 4 (empat) Badan Khusus, yaitu:

1. BIF: Badan Investigasi Front

BIF bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan FPI. BIF memiliki dua visi

a. Devisi Inteljen

Devisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang merugikan Islam dan FPI

b. Devisi Pencari Fakta

Devisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan inteljen FPI

2. BTF: badan anti Teror Front

Ancaman, intimidasi, dan berbagai terror hampir setiap saat menghampiri setiap aktivitas FPI. dalam hal ini BTF memainkan peranan penting untuk mengantisipasi, menghadapi dan melawan segala bentuk terror tersebut. BTF bekerja sama dengan BIF untuk melakukan “kontra teror” maupun “kontra intelijen” terhadap musuh-musuh islam yang melakukan terror ataupun penyusupan ke dalam aktivitas umat islam.

3. BPF: badan Pengkaderan Front

BPF adalah badan khusus yang bertanggung jawab menangani sistem pengkaderan FPI badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan, dan pelatihan para kader FPI

4. BAF: Badan Ahli Front

BAF adalah laboratorium strategi FPI dalam pengkajian persoalan kehidupan dan di segala sector keilmuan. Di BAF inilah para pakar FPI dari berbagai disiplin ilmu berkumpul. Ke depan diharapkan BAF mampu menjadi *think-think* bagi FPI, bahkan bagi kehidupan masyarakat secara umum.

Dan FPI memiliki 4 (empat) Lembaga Otonom:

1. PMF: Lembaga Pemantau Ma'siat Front

Lembaga ini bertugas sebagai pemantau independen terhadap aktivitas kemaksiatan di Indonesia. Khususnya, terhadap pelanggaran hukum-hukum yang dilakukan oleh para pengusaha masiat dan para pelindungnya dari kalangan pejabat Negara, termasuk aparat keamanan.

2. LDF: Lembaga Dakwah Front

LDF adalah wadah silaturrohim para muballigh/ da'I FPI, sekaligus sebagai pusat pengembangan da'wah islam yang diprogramkan FPI. LDF memiliki dua fungsi, internal dan eksternal. Fungsi internal adalah mensosialisasikan da'wah dikalangan aktifis FPI, termasuk pembinaan mental spiritual dan pengembangan Sumber Daya Da'wah yang dimiliki FPI. sedangkan fungsi eksternalnya adalah mensosialisasikan da'wah islam ditengah masyarakat.

3. LEF: lembaga Ekonomi Front

Tugas LEF adalah membangun ekonomi FPI agar tidak menjadi organisasi yang lemah. Untuk itu, LEF berkewajiban melakukan

terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga kedepan FPI mampu memiliki “Profit Center” yang ditangguh untuk mendanai perjuangan amar ma’ruf nahi munkar.

4. BHF: Lembaga Bantuan Front

BHF telah menunjukkan eksistensinya sebagai Lembaga Bantuan Hukum FPI. sejak FPI berdiri hingga kini, tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih secara terus-menerus melakukan litigasi advokasi untuk aktivitas FPI.

Selain itu, FPI memiliki 4 (empat) Anak Organisasi:

1. Laskar Pembela Islam (LPI)

LPI adalah barisan pemuda FPI yang menjadi satuan tugas organisasi dengan fungsi serba guna. Struktur kepemimpinan LPI berdasarkan jabatan dan kepangkatan yang ditentukan mulai karir dan prestasi para anggotanya.

Pemimpin LPI di tingkat Nasional disebut Imam Besar Laskar. Di tingkat provinsi disebut Imam Laskar. Di tingkat kecamatan disebut Qoid laskar. Di tingkat Kelurahan/ Desa disebut Amir Laskar. Ditingkat Front (regu) disebut Rois Laskar. Sedangkan para laskar disebut Jundi

2. Mujahidah Pembela Islam (MPI)

MPI adalah barisan muslimat FPI selama ini aktivitasnya masih terfokus kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Namun demikian, tidak jarang MPI ikut melibatkan diri secara aktif dalam berbagai aksi damai FPI. kehadiran MPI sebagai sayap FPI dimaksudkan untuk menampung

dan menyalurkan aspirasi serta semangat *amar ma'ruf nahi munkar* para kaum wanita islam. Misi utamanya adalah memperjuangkan kaum wanita agar berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia dan akhirat

3. Serikat Pekerja Front (SPF)

SPF adalah perhimpunan para anggota FPI yang bekerja sebagai buruh/ pegawai/ karyawan di berbagai pabrik dan perusahaan. Untuk pertama kalinya DPP-FPI mencanangkan dan mendeklarasikan SPF di wilayah Tangerang atas desakan para aktivis FPI Tangerang yang kebanyakan berasal dari kalangan buruh pabrik

4. Front Mahasiswa Islam (FMI)

Sejumlah mahasiswa yang selama ini aktif di kelaskaran FPI berkeinginan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bukan saja secara fisik. Namun mereka juga ingin beramar ma'ruf nahi munkar dengan berkemampuan intelektual yang dimilikinya, sehingga wawasan akademiknya tidak mubadzir. Akhirnya, digulirkan ide pembentukan FMI. FMI tersebut dirintis oleh para mahasiswa FPI, namun pada perkembangan selanjutnya FMI lebih mandiri dan mulai dimintai mahasiswa dari berbagai kalangan.

Sistem struktur keorganisasian dan kepemimpinan FPI di atas telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam AD/ART FPI. namun perlu dicatat pula AD/ART FPI sebenarnya adalah al-Qur'an, As-Sunnah, AL-Ijma', dan

al-Qiyas.¹³ Artinnya seluruh kandungan AD/ART FPI wajib tunduk kepada keempat sumber hukum Islam autentik tersebut.

Selain di pusat, disetiap wilayah juga terdapat struktur organisasi FPI, karena memang FPI memiliki berbagai cabang, terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Struktur organisasi FPI Surabaya antara lain¹⁴:

A. MAJLIS SYURO TERDIRI DARI

1. Ketua Majelis Syuro: habib Syihabuddin bin Syahab
2. Sekertaris Majelis Syuro: Ust. Khoiruddin
3. Dewan Tertinggi:

Dewan Penasehat:

B. MAJELIS TANFIDZI TERDIRI DARI

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua | : Habib Mahdi bin edrus
Al-Habsyi |
| 2. Wakil Ketua I | : Habib Syakib Al-Jufri |
| Wakil Ketua II | : Habib Abdul Qodir bin
Umar Al Aydrus |
| 3. Sekertaris | : Abdul wahid Murtadho |
| 4. Bendahara | : Ust. Abdul Halim Wahyudi |
| 5. HUMAS | : H. M Nasir Zaini
H. Husnin Yasin |
| 6. Badan-badan Khusus | |
| a. Badan Investigasi dan Pencari Fakta | : Ust. Kholil |

¹³ Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI: AMar MA'ruf Nahi Munkar*, 203

¹⁴ Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART), t.t, 3

H. Toyiyib

b. badan Bantuan Hukum : Habib Ahmad bin Anis
Al-Hasni

7. Anak Organisasi Front

a. Laskar Pembela Islam (LPI)

Imam Wilayah : Habib Muhammad bin Hadi
bin Syeikh Abu Bakar

Kooriap : M. Junaidi
H. Ma'ruf
Moch. Muni Latif

b. Mujahidah Pembela Islam

Ketua : Ny. Habib Mahdi Al-Habsyi

Adapun struktur organisasi yang ada hanya dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan pembagian tugas dalam melakukan gerakan. Struktur organisasi tertinggi bernama Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di Jakarta. Di tingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Wilayah, dan ditingkat kabupaten disebut Dewan Pengurus Cabang. meski ada struktur organisasi dan hierarki kepemimpinan, hubungan pada tiap-tiap tingkatan tidak terjadi secara struktural. Masing-masing daerah berhak melakukan aktivitas tanpa harus melakukan koordinasi dengan pengurus yang lebih atas. Meskipun demikian, pengurus yang lebih atas tetap melakukan pemantauan

terhadap beberapa aktivitas cabang dengan mekanisme yang teramat longgar karena memang tidak ada pola dan aturan yang jelas dan pasti.¹⁵

Dan untuk merealisasikan tujuan organisasi, dan dalam upaya memaksimalkan kerja organisasi, yakni jamaah FPI dan laskar FPI. Jamaah FPI ini melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sedangkan laskar FPI bertugas melakukan *pressure* fisik untuk membrantas kemaksiatan secara langsung, seperti penyerbuan tempat hiburan, *sweeping*, dan demonstrasi. Seluruh aktivis FPI ditangani secara langsung dan dikomandoi oleh ketua umum. Dengan tidak adanya mekanisme organisasi yang jelas maka ketua umum FPI memiliki otoritas penuh untuk mengambil inisiatif dan kebijakan. Sebagai organisasi yang berorientasi pada gerakan agama maka gerak dan langkah organisasi harus berada di bawah kendali langsung pemimpin.¹⁶

D. Faham keagamaan FPI

Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen *Risalah historis dan garis perjuangan FPI*, asas FPI adalah Islam ala *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja).

“FPI menggunakan faham Ahlussunnah Wal Jama'ah, seperti ahlussunnah miliknya NU. Akan tetapi, NU belum tentu ahlussunnah waljama'ah, Tapi kalau ahlussunnah waljamah sudah tentu NU”¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Mohamad Mahdi Edrus Al-Habsyi pada 13 Januari 2013, Petukangan Surabaya.

¹⁶ Ibid, _

¹⁷ Ibid, _

Akan tetapi, dijelaskan dalam bukunya Ja'far Umar Thalib, bahwa aswaja yang dipahami FPI tidaklah sama dengan yang difahami oleh kalangan NU maupun Muhammadiyah. Aswaja yang dipahami para aktivis FPI lebih mendekati pemahaman Aswaja menurut kelompok Salafi yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib di Yogyakarta. Menurut kelompok ini, Aswaja adalah mereka yang telah sepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadist dan mereka itu adalah para sahabat dan tabi'in (orang yang belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu).¹⁸

Mereka tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa asal mula Aswaja adalah dari Abu Hasan al-Asy'ari dan abu Mansur al-Maturidi. Yang menjadi acuan paham keislaman warga NU, dalam bukunya Achmad Masduq *Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah wal Jama'ah* menjelaskan bahwa paham Aswaja mengikuti madzab al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang akidah, mengikuti salah satu dari madzab empat (Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali) dalam bidang fiqh, mengikuti al-Ghazali dan Abu al-Qosim al-Junaidy dalam bidang tasawuf, dan mengikuti al-Bukhari dan Muslim dalam bidang Hadits.

Menanggapi pernyataan Achmad Masduqini, Ahmad Hamdani dan Suyuti Abdaullah, keduanya adalah aktivis Jama'ah Salafiyah, berkomentar:

“kalau yang dimaksud oleh penulis (Achmad Masduq) adalah Ahlussunnah wal Jama'ah ala Indonesia (yang sebenarnya mereka asy'arian), barangkali dibenarkananya tarekat-tarekat tersebut. Namun

¹⁸ Ja'far Umar Thalib, *Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1995), 14

permasalahannya, Ahlussunnah wal Jama'ah bukan milik orang Indonesia atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi, Ahlussunnah wal jama'ah adalah satu-satunya jalan atau metode yang *haq* yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak diperbolehkan seorang pun menentukan cara sendiri ketika menjalankan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa mengamalkan suatu cara dalam agama tanpa mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka amalannya tertolak dan dia telah berbuat bid'ah"¹⁹

Dari ungkapan di atas terlihat satu hal yang membedakan paham Aswaja kelompok ini dengan ormas Islam lainnya (NU dan Muhammadiyah) bahwa mereka berusaha menjaga otentisitas agama, sampai pada hal-hal yang sifatnya simbolik. Perbedaan atas ritus dan symbol dianggap sebagai penyimpangan ajaran agama. Dalam pemahaman kelompok ini, paham keagamaan para sahabat harus dipegang secara kuat karena Allah dan rasul-Nya banyak sekali memberi penjelasan tentang kemuliaan para sahabat, bahkan memujinya.

Menurut kelompok ini, mengikuti jejak kaum *salafus shalih* harus dilakukan secara total, tanpa reserve, apa yang dipahami, dilakukan, dan difatwakan oleh para sahabat yang tercermin dalam diri para pemimpin agama diikuti secara utuh dan apa adanya, tidak mengurangi dan juga tidak menambah. Hal ini meliputi bidang akidah, hukum, dan tingkah laku keseharian, seperti cara berpakaian, makan, minum, dan shalat. Hal-hal inilah yang membedakan faham *Ahlussunnah wal Jma'ah* yang dianut FPI dan

¹⁹ Ahmad Hamdani dan Suyuti Abdullah, *Penyimpangan Terhadap Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1997), 59

kelompok Salafi pimpinan Ja'far Umar Thalib dengan faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dipahami oleh kalangan NU dan Muhammadiyah²⁰.

Meskipun paham Aswaja kelompok FPI dengan kelompok Salafi memiliki kesamaan, di dalam penerapannya terdapat perbedaan. Kelompok Salafi yang tergabung dalam *Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jama'ah* (FKAWI) Yogyakarta pimpinan Ja'far Umar Thalib memahami dan menerapkan paham Aswaja ini secara kaku. Akibatnya, kelompok ini menjadi terlihat sangat ortodoks dan intoleran terhadap perbedaan. Sikap ini pada gilirannya menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat lokal dengan kelompok Salafi di mana mereka bertempat tinggal. Sebab, kelompok Salafi ini terkesan eksklusif dan tidak familiar dengan masyarakat setempat.²¹

E. Keanggotaan, Rekrutmen, dan Kaderisasi

1. Keanggotaan

Dalam AD/ART FPI di jelaskan bahwa terdapat pengklasifikasian anggota, yaitu terdiri dari anggota individu anggota kelompok. Anggota individu terdiri dari anggota biasa, teras, dan kehormatan. Anggota biasa yaitu anggota yang memiliki wawasan keilmuan yang memadai dan memiliki ruhul jihad. Anggota teras yaitu anggota biasa yang telah lulus dari jenjang pengkaderan/pelatihan yang dibuat DPP-FPI. sedangkan anggota kehormatan yaitu orang yang berjasa terhadap perjuangan islam

²⁰ Ibid, 63

²¹ Sabaruddin, dkk. *Paham Keagamaan dan Perilaku Politik Salafiyah Ahlussunnah wal Jama'ah/ Laskar Jihad di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 69

dan anggota yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Sedangkan anggota kelompok terdiri dari anggota fusi dan aliansi. Anggota fusi merupakan anggota yang membubarkan eksistensi kelompok/lembaga/organisasinya, menggabungkan seluruh anggota, perangkat dan asetnya ke tubuh FPI. Sedangkan anggota aliansi yaitu anggota yang menyatakan secara tertulis kesediaan beraliansi dengan FPI melalui putusan sah organisasinya dan anggota yang menyesuaikan AD/ART organisasinya dengan asasi organisasi FPI.

Para anggota FPI tidak terikat pada aturan organisasi yang formal dan ketat. Pengikat utama yang menyatukan anggota FPI adalah komitmen moral dan loyalitas pada pemimpin. Setiap orang yang bersedia menerima garis perjuangan FPI, memiliki loyalitas kepada pemimpin, dan siap melaksanakan amanat dari pemimpin yang dibebankan kepadanya maka dia bisa dianggap sebagai anggota FPI. Habib Mahdi mengatakan:

“mudah sekali mbak untuk menjadi anggota FPI. Saya tidak bilang yang anggota FPI itu bukan orang yang pernah maksiat tapi orang yang sudah berhenti maksiat, untuk menjadi anggota FPI itu harus yang sudah tobat untuk tidak lagi melakukan maksiat, yaitu taubatan nashuhah, itu saja tidak ada yang formal yang harus mengisi formulir segala”²²

2. Rekrutmen

Sebagai organisasi gerakan yang tidak begitu mementingkan bentuk kelembagaan, FPI tidak melakukan rekrutmen keanggotaan secara permanen dan sistematis. Akan tetapi, untuk memenuhi standar formalitas organisasi, FPI tetap melaksanakan rekrutmen ke anggota secara formal.

²² Wawancara dengan Mohamad Mahdi Edrus Al-Habsyi pada 13 Januari 2013, dikediamanya, Petukangan, Surabaya.

Meski hal ini tidak menjadi sesuatu yang utama. Pada saat-saat tertentu, FPI mengedarkan formulir pendaftaran untuk menjadi anggota organisasi. Formulir ini diedarkan di kampus-kampus, majlis taklim dan juga dikalangan masyarakat. Dalam proses rekrutmen formal ini, dilakukan testing untuk para calon anggota, yang meliputi membaca Al-Qur'an, pengetahuan mengenai rukun Islam, rukun Iman, dan syahadat. Testing ini dilakukan bukan sebagai alat seleksi untuk menentukan diterima atau tidaknya seorang calon anggota, tetapi hanya untuk mengetahui taraf pemahaman dan pengetahuan keislaman mereka. menurut para tokoh FPI, ini penting untuk dilakukan untuk proses pembinaan lebih lanjut. Karena tidak ada program baku dari organisasi maka rekrutman anggota dengan jalur formal ini tidak dilakukan secara regular, tetapi hanya isendental sesuai dengan kebutuhan, kadang bisa setahun sekali, setahun dua kali, bahkan bisa tidak dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun.²³

Oleh karena pola rekrutmen dan bentuk organisasinya sangat cair maka keanggotaan FPI juga bersifat sangat cair. Seseorang dapat dengan mudah masuk ataupun meninggalkan (keluar) organisasi tanpa harus memenuhi prosedur birokrasi atau proses yang rumit. Jika mereka aktif mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan FPI, dia akan dianggap sebagai anggota FPI. Sebaliknya, jika seorang anggota FPI tidak pernah aktif dan jarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi maka dia bisa dianggap telah keluar dari FPI. akan tetapi

²³ Wawancara dengan Abdul Wachid Murtadlo pada 14 Januari 2013, di kediamannya, Wonosari Timur Surabaya.

ini hanya berlaku untuk anggota, bukan untuk jajaran pengurus. Sebab, para pengurus FPI diwajibkan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karena mereka adalah penerima amanat yang sekaligus harus menjalankannya. Jika seorang pengurus tidak menjalankan amanat tersebut maka dia dapat dikatakan sebagai penghianat. Adapaun yang menentukan sebagai penghianat atau tidaknya adalah ketua umum dan para anggota Majelis Syoro.²⁴

3. Kaderisasi

Oleh karena longgaranya aturan main yang ada dalam organisasi ini maka pola kaderisasi dalam tubuh FPI juga dilakukan secara longgar. Pembinaan anggota dan kader dilakukan secara nonformal, misalnya melalui pengajian, ceramah, dan penugasan saat diselenggarakannya suatu aktivitas tertentu. Selain itu, ada pola lain dalam kaderisasi FPI, yaitu pemagangan. Artinya, kader-kader tertentu yang telah memiliki derajat loyalitas dan komitmen tertentu terhadap pimpinan, dia akan dijadikan ajudan oleh pemimpin tertentu.²⁵

Sesuai dengan pemahaman keanggotaan FPI yang mengidealisasikan model keislaman para salafus shalih maka pola rekrutmen dan pembinaan kader FPI juga mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh para sahabat. Pada era sahabat, basis pembinaan anggota dan kader adalah masjid. Secara sosiologis, anggota FPI dapat dipilih menjadi empat kategori:

²⁴ Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART), t.t 17

²⁵ Ibid, 20

- a) Masyarakat awaam, yaitu masyarakat biasa yang ikut aktif dalam pengajian yang diselenggarakan oleh FPI.
- b) Kelompok intelektual dan akademisi. Yaitu, para mahasiswa, dosen, dan peneliti. Mayoritas intelektual dan akademisi yang masuk menjadi anggota FPI dari perguruan tinggi umum dan pada umumnya mereka tidak memiliki pendidikan agama yang kuat.
- c) Kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini direkrut FPI tidak melalui jalur formal pendaftaran, tetapi melalui pendekatan personal yang dilakukan oleh para pemimpin FPI. mereka pada umumnya diarahkan untuk menjadi anggota laskar FPI. mereka tidak dibekali pendidikan agama, tetapi lebih banyak dididik latihan fisik untuk melakukan sweeping, penggrebakan, dan demonstrasi.
- d) Golongan Habaib dan alim ulama. Kelompok inilah yang merupakan kelompok elit dalam FPI. mereka tidak saja menduduki posisi penting dalam FPI, tetapi sekaligus menjadi pengarah dan penentu kebijakan

F. Jaringan Kerja FPI

FPI mempunyai jaringan kelompok-kelompok islam lainnya, seperti NU, Muhammadiyah dan ormas islam lainnya yang dibentuk dengan nama GUIT (Gerakan Umat Islam Jawa Timur) di bawah pimpinan MUI Jawa Timur. Akan tetapi, kerja sama yang dilakukan cenderung hanya bisa dilakukan jika FPI berada di depan dan menjadi pemimpin kegiatan yang melibatkan organisasi Islam lainnya. Atau sebaliknya, ada isu bersama yang

layak untuk direspons secara bersama-sama sehingga dalam kegiatan seperti ini tidak ada yang memimpin dan dipimpin, semua menjadi pemimpin dengan cara membentuk aliansi saksi, seperti ketika aksi menentang Israel dan Amerika. Semua kerja sama ini dilakukan FPI untuk menunjang program-program dan kegiatan formal organisasi.²⁶

Karena FPI yang paling aktif dalam GUIT, maka ketika terjadi kerusuhan, FPI yang paling terlihat oleh media. Padahal di sini FPI sudah memberikan upeti/membayar media untuk merekam aksi FPI yang diharapkan media mampu untuk merekam kenyataan dan kebenaran yang terjadi, agar FPI sendiri tidak dianggap sebagai organisasi yang anarkis atau pembuat ulah.²⁷

Selain melakukan kerja sama kelompok Islam lainnya, FPI juga bekerja sama dengan aparat kepolisian ketika mendapati tempat yang dianggap dipakai untuk ajang kemaksiatan, perjudian, dan lainnya. Misalnya aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam membrantas kemaksiatan atau yang lainnya, maka aparat ini meminta bantuan kepada FPI untuk bergerak. Begitu juga sebaliknya, ketika FPI melakukan penelusuran tempat yang dianggap sebagai ajang kemaksiatan maka FPI akan segera melaporkannya ke aparat kepolisian. Akan tetapi jika aparat tidak bisa melakukannya, maka FPI terjun langsung ke tempat dengan meminta persetujuan dari Camat, Polres, Polsek, atau biasanya juga sampai ke kelurahan.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Habib Mohamad Edrus Syihab di kediamannya pada 13 Januari 2013.

²⁷ Ibid, _

²⁸ Ibid, _